ELASTISITAS
ISSN: 2655-6944
http://elastisitas.unram.ac.id
Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 6, No. 1, Maret 2024

Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Sumbawa

Subhan Purwadinata[1*], Ika Fitriyani[2], Muhammad Nur Fietroh[3], Ali Akbar Hidayat[4]
[1,4]Universitas Mataram, Indonesia
[2]Universitas Samawa, Indonesia
[3]Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:
Indikator, Kemiskinan multidimensi, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemiskinan multidimensi di Kabupaten Sumbawa. Analisis data ynag digunakan pada penelitian ini adalah analisis perhitungan kemiskinan multidimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa berdasarkan pada perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Sumbawa menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita sebesar 18,3 %. Prevalensi penyakit yang mengganggu pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 32,1%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 16,3%, angka partisipasi sekolah ahun 2023 adalah 6,98%. Angka harapan lama sekolah (AHS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 11,7 tahun. Persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 14,4%. Persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 122,58 %. Persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 65,35 %. Persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 46,67 %. Persentase individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 1.3%. dan terakhir persentase rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 21,82%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%. Kesimpulan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/ program penanganan kemiskinan.

Keywords:
Indicators, Multidimensional Poverty, Multidimensional Poverty Index (IKM)

ABSTRACT

This research aims to determine multidimensional poverty in Sumbawa Regency. The data analysis used in this research is multidimensional poverty calculation analysis. The results of the research show that Sumbawa Regency, based on the calculation of the Multidimensional Poverty Index in Sumbawa Regency, shows the results of calculating the value of IKM with the nutritional proportion of IKM RT with children under five being 18.3%. The prevalence of diseases that interfere with main work in Sumbawa Regency in 2023 is 32.1%. This figure is higher than the national average of 16.3%, the school enrollment rate in 2023 is 6.98%. The expected length of schooling (AHS) in Sumbawa Regency in 2023 is 11.7 years. The percentage of households with a floor area under 7.2 square meters per person in Sumbawa Regency in 2023 is 14.4%. The percentage of individuals in households who drink from unsuitable drinking water sources in Sumbawa Regency in 2023 is 122.58%. The percentage of individuals in households who use inadequate cooking fuel sources in Sumbawa Regency in 2023 is 65.35%. The percentage of individuals in households who use inadequate cooking fuel sources in Sumbawa Regency in 2023 is 46.67%. The percentage of individuals who do not have a birth certificate in Sumbawa Regency in 2023 is 1.3%. and finaly the percentage of households in Sumbawa who did not use the internet during the last 3 months was 21.82%. This figure is higher than the national average of 9.69%. The conclusion of this research is that based on the results of multidimensional poverty measurements to determine priorities for poverty management policies/programs.

***Corresponding Author: subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id**

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi tantangan sosial yang menyerang banyak negara di seluruh dunia. Namun, definisi tradisional kemiskinan seringkali terlalu sempit, terfokus hanya pada parameter pendapatan atau ekonomi. Pengukuran yang hanya mengandalkan parameter ekonomi seringkali gagal memperhitungkan aspek-aspek penting lainnya dari kehidupan manusia yang dapat menjadi indikator penting dari kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.

Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat global. Namun, pendekatan tradisional untuk mengukur kemiskinan seringkali terbatas pada dimensi tunggal, seperti pendapatan atau konsumsi. Pendekatan ini dapat mengabaikan beragam aspek kehidupan yang juga mempengaruhi kesejahteraan individu dan komunitas (Alkire, S., & Foster, J. (2011).

Kemiskinan multidimensi mampu menyentuh aspek kemiskinan secara menyeluruh, karena tidak hanya mengungkap jumlah orang miskin, tetapi juga merinci persoalan kemiskinan. Sebagai contoh indikator moneter global yang ditetapkan Bank Dunia sebesar USD 2,15 per individu per hari hanya menggambarkan wajah kemiskinan moneter. Padahal kemiskinan bukan hanya menyangkut kemampuan daya beli, pendapatan, atau konsumsi, tetapi ada dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan (Sen, 1980 & 2000). Studi (Narayan et al (1997) juga menggarisbawahi bahwa kemiskinan pada dasarnya bersifat multidimensi yang berhubungan satu sama lain.

Untuk memahami secara menyeluruh dampak kemiskinan dan untuk merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasinya, perlu diperluas pandangan kita terhadap kemiskinan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah konsep kemiskinan multidimensi. Kemiskinan multidimensi mengakui bahwa kemiskinan bukanlah masalah tunggal, tetapi terdiri dari berbagai dimensi yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Mengingat kemiskinan memiliki arti sangat luas dan cenderung subyektif antar individu, studi tentang pengukuran dan kebijakan kemiskinan perlu dibuat lebih fleksibel dan terukur sesuai relevansi kondisi masyarakat. Atkinson (1975) menyatakan bahwa tidak mungkin melihat kemiskinan dengan standar mutlak yang diterapkan di semua negara sepanjang waktu. Hal ini cukup beralasan mengingat standar hidup masyarakat yang sangat heterogen dan bergantung pada banyak faktor atau variabel.

Pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan mencakup beragam aspek kehidupan manusia yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, perumahan layak, akses terhadap pekerjaan yang layak, keamanan pangan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih hidup dalam kemiskinan multidimensi jika dia tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak atau pendidikan yang berkualitas.Begitu juga, seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang stabil mungkin masih menderita kemiskinan multidimensi jika dia tinggal di lingkungan yang tidak sehat atau tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Pendekatan ini dianggap memberikan konsep alternatif mengenai perilaku individu termasuk menilai kelayakan kualitas hidup dan tujuan kebijakan yang obyektif. Human Development Index (HDI) yang terdiri dari indikator kesehatan, usia hidup pendidikan, dan standar hidup juga mengadopsi pendekatan ini serta sudah diimplementasikan dalam Human Development Report (1997). Alkire-Foster (2011) menggunakan konsep HDI sebagai dasar dalam mengembangkan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.

Dalam menganalisis dan mengukur kemiskinan multidimensi, penting untuk menggunakan indikator yang sesuai dengan masing-masing dimensi yang terlibat. Ini memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kemiskinan dan merancang strategi intervensi yang lebih efektif.

Dengan memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensi, kita dapat lebih baik menangkap kompleksitas kondisi kehidupan yang dihadapi oleh individu dan komunitas yang terpinggirkan. Hal ini juga membuka jalan bagi pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penekanan pada kemiskinan multidimensi bukan hanya mengejar target pengentasan kemiskinan dalam arti sempit, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis kemiskinan multidimensi di Kabupaten Sumbawa.

2. METODOLOGI

Metodologi penelitian dalam meneliti kemiskinan multidimensi memerlukan pendekatan yang holistik dan terstruktur untuk memahami

kompleksitas dan interkoneksi berbagai dimensi kemiskinan. Berikut beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, Pengidentifikasian dimensi kemiskinan yaitu dengan melakukan identifikasi dan memahami dimensi-dimensi kemiskinan yang relevan dan signifikan. Ini dapat mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, akses terhadap layanan dasar, dan aspek sosial lainnya.

Kedua, Pengembangan Indikator : Setelah dimensi-dimensi kemiskinan diidentifikasi, langkah berikutnya yaitu mengembangkan indikator yang sesuai untuk setiap dimensi, seperti dalam hal kasus dimensi kesehatan, indikator dapat mencakup harapan hidup, angka kematian bayi, atau akses terhadap layanan kesehatan.

Ketiga, Pengumpulan Data : Data harus dikumpulkan untuk masing-masing indikator yang telah dikembangkan. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, observasi lapangan, atau penggunaan data sekunder dari lembaga statistik atau organisasi terkait.

Keempat, Analisis Data : Setelah data terkumpul, analisis statistik dan kualitatif dilakukan untuk memahami tingkat kemiskinan multidimensi dan pola keterkaitannya dengan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis konten.

Kelima, Integrasi Dimensi : Dalam langkah kelima yaitu arti penting dalam mengintegrasikan hasil dari berbagai dimensi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kemiskinan multidimensi. Ini dilakukan melalui pembuatan dan perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) atau pemetaan spasial yang menunjukkan pola distribusi kemiskinan dalam ruang dan waktu.

Keenam, Interpretasi Hasil : Hasil analisis perlu diinterpretasikan dengan cermat untuk menarik kesimpulan yang relevan dan bermanfaat. Hal ini melibatkan mengeksplorasi implikasi kebijakan dari temuan penelitian dan menyoroti area-area di mana intervensi mungkin diperlukan.

Ketujuh, Komunikasi dan Pelaporan: Temuan penelitian ini akan disampaikan dengan jelas dan efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan penelitian, presentasi, atau publikasi ilmiah. Dengan menggunakan metodologi penelitian yang terstruktur dan holistik seperti ini, maka dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan multidimensi, yang pada gilirannya dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti temuan utama yaitu menghitung tingkat kemiskinan multidimensi di wilayah yang diteliti yaitu di Kabupaten Sumbawa dengan harapan bahwa pola keterkaitan antar dimensi kemiskinan, dan faktor-faktor berkontribusi pada kemiskinan multidimensi.

Indikator Nutrisi Balita Kabupaten Sumbawa

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah individu dalam rumah tangga yang berumur 0-4 tahun dengan gizi seimbang yang dibawah rekomendasi pemerintah di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 16.089 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 8.045 laki-laki dan 8.044 perempuan. diperoleh dari hasil survei status gizi balita yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 1.200 rumah tangga yang memiliki balita.

Survei BPS Kabupaten Sumbawa melibatkan 1.200 rumah tangga yang memiliki balita. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa bahwa prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 berada dalam kisaran persentase tertentu.

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Proporsi gizi IKM RT dengan Balita tersebut di atas menunjukkan bahwa proporsi gizi kemiskinan multidimensi dengan balita sejalan dengan hasil survei prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan IKM yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Proporsi gizi IKM RT dengan Balita} = \frac{\Sigma \text{ RT dengan balita tidak cukup gizi}}{\Sigma \text{ RT sampel dengan balita}}$$

= 219,6 / 1200

= 0,183

= 18,3 %

Berdasarkan hasil perhitungan IKM yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita Kabupaten Sumbawa sebesar ***18,3 %.*** Angka ini masih di atas target pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%.

Indikator Morbiditas Kabupaten Sumbawa

Untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka morbiditas (angka kesakitan) yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi angka morbiditasnya.

Hal ini menunjukkan semakin rendahnya derajat kesehatan di wilayah tersebut. Sebagaimana kondisi Morbiditas di Kabupaten Sumbawa sebagai daerah dengan tingkat morbiditas tertinggi ditunjukkan dalam menunjukkan trend yang terus meningkat artinya telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya persoalan morbiditas di Kabupaten Sumbawa demikian tingginya yang walaupun di tahun 2019 angka kesakitan ada sedikit penurunan disebabkan sosialisasi dan treatment peningkatan kewaspadaan terhadap kesehatan khususnya tingkat kesakitan bagi masyarakat aktif bekerja telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Proporsi Morbiditas =

$$\frac{\Sigma \text{ RT dengan anggota RT memiliki keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari} - \text{hari}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 385,2 /1200

= 0,321

= 32,1 %

Berdasarkan hasil survei, prevalensi penyakit yang mengganggu pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 32,1%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 16,3%.

Dimensi Pendidikan

Indikator Partisipasi Sekolah Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB tahun 2023, bahwa jumlah individu dalam rumah tangga berumur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah di Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 698 orang. Data jumlah penduduk miskin ekstrim yaitu sebesar orang yang dijadikan sebagai sampel terhadap penduduk miskin ekstrim yang tidak tamat sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah. dalam penelitian ini sehingga setelah dilakukan perhitungan IKM Partisipasi sekolah sebagai berikut Jumlah ini merupakan dari total penduduk berumur 7-18 tahun di Kabupaten Sumbawa tahun 2023, yang berjumlah 2.020 orang.

IKM Partisipasi Sekolah =

$$\frac{\Sigma \text{ RT dengan anggota RT Usia Sekolah yang tidak bersekolah}}{\Sigma \text{ RT sampel dengan Anggota RT Usia Sekolah}}$$

= 698 / 10.000

= 6,98 %

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh enumerator peneliti di lapangan bahwa ditemukan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah, antara lain Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa kurang mampu, Menyediakan transportasi sekolah untuk siswa yang tinggal di daerah terpencil, Membangun sekolah baru di daerah terpencil dan Meningkatkan kualitas.

Indikator Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah individu dalam rumah tangga berumur 19-30 tahun yang pendidikannya dibawah rekomendasi SMP di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 14.040 jiwa. Angka ini diperoleh dari hasil survei pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 1.200 rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga berumur 19-30 tahun.

Proporsi IKM Angka Lama Sekolah =

$$\frac{\Sigma \text{ RT dengan anggota RT usia } 16-30 \text{ tahun tidak mempunyai ijazah minimal setara SMP}}{\Sigma \text{ RT sampel dengan Anggota RT Usia } 16-30 \text{ tahun}}$$

= 14.040 / 1200

= 11,7 tahun

Berdasarkan hasil survei, angka harapan lama sekolah (AHS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 11,7 tahun. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 12,8 tahun. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah individu dalam rumah tangga berumur 19-30 tahun yang pendidikannya dibawah rekomendasi SMP di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan.

Pola hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk menurunkan angka harapan lama sekolah yang sudah lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Upaya-upaya tersebut antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka harapan lama sekolah yang rendah. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka harapan lama sekolah yang rendah.

Dimensi Perumahan

Indikator Rumah Layak Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data P3KE menunjukkan bahwa jumlah individu dalam rumah tangga miskin ekstrim yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak dalam bentuk atap jerami, ijuk dan daun-daunan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 6.886 jiwa. Sampel yang diambil adalah standar sampel survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Sumbawa sebesar 10.000 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh :

Proporsi IKM Rumah Layak

$$= \frac{\Sigma \text{ RT Terdevrivasi}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 6.886 / 10.000

= 68,86 %

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah individu dalam rumah tangga yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh pelayanan perumahan. Pola hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung kepemilikan rumah tinggal yang layak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk menurunkan angka persentase rumah tangga yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak. Upaya-upaya tersebut antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Melakukan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka persentase rumah tangga yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak yang tinggi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak secara lebih intensif,

Indikator Rumah tangga yang mempunyai luas lantai dibawah <7,2 meter persegi per orang Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 20.403 rumah tangga. Jumlah ini terdiri dari 10.202 rumah tangga berpenghasilan kepala keluarga laki-laki dan 10.201 rumah tangga berpenghasilan kepala keluarga perempuan.

Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 14,4%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 7,8%.

Proporsi IKM Kepadatan RT dalam hunian

$$= \frac{\Sigma \text{ RT Terdevrivasi}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 1.440 / 10.000

= 14,4 %

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan bagi rumah tidak layak huni. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah layak huni. Meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah layak huni. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh pelayanan perumahan.

Gaya hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung kepemilikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk menurunkan persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang. Upaya-upaya tersebut antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan bagi rumah tidak layak huni di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah layak huni secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah dengan persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang yang tinggi.

Dimensi Kebutuhan Dasar

Indikator Air Minum Layak Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB menunjukkan bahwa jumlah individu dalam rumah tangga miskin ekstrim yang menggunakan air minumnya dari air hujan dan air permukaan yaitu dari air sungai dan air danau pada tahun 2023 adalah sebanyak 28 jiwa. Sampel yang diambil adalah standar sampel survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Sumbawa sebesar 10.000 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh :

Proporsi IKM Air Minum Layak

$$= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tangga Terdevrivasi}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 28 / 10.000

= 0,28 %

Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 122,58 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.

Indikator Bahan Bakar Memasak

Indikator Bahan Bakar Memasak Kabupaten Sumbawa

Menurut data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB, jumlah individu dalam rumah tangga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim yang memasak menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak seperti menggunakan arang/kayu bakar di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 6.535 orang. Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023.

Menggunakan acuan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Sumbawa yaitu standarisasi melibatkan 10.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Sumbawa.

Proporsi IKM Bahan Bakar Memasak

$$= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tangga Terdevrivasi}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 6.535 / 10.000

= 65,35 %

Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 65,35 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar memasak yang layak, antara lain dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap program penyediaan kompor dan tabung LPG subsidi. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menggunakan bahan bakar memasak yang layak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahan bakar memasak yang layak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar memasak yang layak di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh program penyediaan kompor dan tabung LPG subsidi. Gaya hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung penggunaan bahan bakar memasak yang layak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan upaya yang lebih intensif

untuk menurunkan persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap program penyediaan kompor dan tabung LPG subsidi di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menggunakan bahan bakar memasak yang layak secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah dengan persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak yang tinggi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahan bakar memasak yang layak secara lebih intensif, terutama di daerah-daerah dengan persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak yang tinggi.

Indikator Sanitasi

Indikator Sanitasi Kabupaten Sumbawa

Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) BAPPEDA Provinsi NTB, jumlah individu dalam rumah tangga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim yang tidak memiliki jamban atau memiliki jamban yang penggunaannya bersama dan kurang layak pada tahun 2023 adalah 4.667 orang. Angka ini diperoleh dari hasil survei sanitasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Menggunakan acuan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Sumbawa yaitu standarisasi melibatkan 10.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 46,67 %. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.

Proporsi IKM Sanitasi

$$= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tangga Terdevrivasi}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 4667 / 10.000

= 46,67 %

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak, antara lain: Meningkatkan akses masyarakat terhadap program penyediaan jamban subsidi. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menggunakan sanitasi yang layak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan sanitasi yang layak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah individu dalam rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh program penyediaan jamban subsidi. Gaya hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung penggunaan sanitasi yang layak.

Dimensi Perlindungan Sosial dan Partisipasi

Indikator Akta Kelahiran Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, jumlah individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 21.820 orang. Jumlah ini terdiri dari 10.910 orang laki-laki dan 10.910 orang perempuan. Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil survei, persentase individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 1.3%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 4.6%.

Proporsi IKM Akta Kelahiran

$$= \frac{\Sigma \text{ Individu tidak memiliki akta kelahiran}}{\Sigma \text{ Individu sampel}}$$

= 130 / 10.000

= 1,3 %

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap akta kelahiran, antara lain dengan melalukan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap program pendaftaran akta kelahiran. Kemudian pemerintah dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. *Raising awareness of the importance of having a birth certificate for the community.*

Melalui pengawasan pemerintah yang berkelanjutan maka diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa.

Indikator Internet

Indikator Internet Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)

tahun 2023, jumlah rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 21.820 rumah tangga. Jumlah ini terdiri dari 10.910 rumah tangga di perkotaan dan 10.910 rumah tangga di perdesaan. Angka ini diperoleh dari hasil survei terhadap 10.000 rumah tangga di Sumbawa. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sumbawa.

Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 21,82%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%.

Proporsi IKM Akses Internet

$$= \frac{\Sigma \text{ RT dengan anggota RT tidak mengakses internet}}{\Sigma \text{ RT sampel}}$$

= 21.820 / 10.000

= 21,82%

Penyebab rumah tangga di Sumbawa tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Kurangnya akses internet di wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan internet. Keterbatasan biaya untuk mengakses internet. Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap internet, sehingga dapat mengurangi jumlah rumah tangga yang tidak menggunakan internet.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa yakni dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur internet di wilayah-wilayah yang belum terjangkau internet. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan internet kepada masyarakat. Menyediakan akses internet gratis di tempat-tempat umum, seperti perpustakaan, balai desa, dan sekolah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan jumlah rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan internet dapat terus berkurang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan menghitung berbagai indikator kemiskinan multidimensi bahwa dengan menggaris bawahi pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami dan mengatasi kemiskinan secara lebih holistik di Kabupaten Sumbawa dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan IKM yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita Kabupaten Sumbawa sebesar *18,3 %*. Angka ini masih di atas target pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%.
2. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penyakit yang mengganggu pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 32,1%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 16,3%.
3. Berdasarkan hasil survei, bahwa angka partisipasi sekolah ahun 2023 adalah 6,98%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4,63%.
4. Berdasarkan hasil survei, angka harapan lama sekolah (AHS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 11,7 tahun. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 12,8 tahun. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.
5. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 14,4%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 7,8%.
6. Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 122,58 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.
7. Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 65,35 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
8. Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 46,67 %. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
9. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil survei, persentase individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 1.3%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 4.6%.
10. Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan

internet selama 3 bulan terakhir adalah 21,82%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%.

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487.

Chen, S., & Ravallion, M. (2012). More relatively-poor people in a less absolutely-poor world. Review of Income and Wealth, 58(1), 1-28.

Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A., & Koch-Schulte, S. (2000). Voices of the poor: Can anyone hear us? Oxford University Press. Sen, A. (1999).

Development as freedom. Oxford University Press. UNDP. (2019). Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme.

Kementerian Dalam Negeri RI. 2016. Peraturan menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang peningkatancakupan kepemilikan akta kelahiran. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2002. Keputusan Menteri PUPR No 403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Tangga Sehat. Lembaran Kementerian PUPR Tahun 2002No. 403. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Lembaran Kementerian PUPR Tahun 2018 No. 29.Jakarta.

Kementerian Sosial. 2013. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 tahun tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Lembaran Kemensos RI Tahun 2013. No. 146. Jakarta.

Narayan-Parker, D. (1997). Voices of the poor: poverty and social capital in Tanzania (Vol. 20). World BankPublications.

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar No. 31 Tahun 1945. Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran RI Tahun 2003, No. 20. Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2009, No. 36. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. 2020.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Jakarta.